

**DOKUMEN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)**

**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SIKKA**



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIKKA

JLN.LITBANG TELP. 081237764685

M A U M E R E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1.a TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2024-2026

DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
- c. menyusun pohon kinerja;
- d. menyusun cascading;
- e. menyusun Rencana Aksi;
- f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan

h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Tahun 2024-2026;
- (4) Format Keputusan Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

KETIGA : Sekretaris Dinas Perhubungan berkewajiban melakukan:

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : (1) Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Dinas Perhubungan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 03 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sikka,

MAURITIUS MINGGO, S.T.,M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740128 20003 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 03 JANUARI 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024 - 2026

- I. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
- II. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Perhubungan.
- III. Fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Perhubungan;
b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Dinas Perhubungan.

IV. Indikator Kerja Urama

NO	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Tujuan	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	Tujuan : Mewujudkan pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	Indeks Kualitas Urusan Perhubungan)	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang diberikan}}{\text{Jumlah Seluruh Layanan Perhubungan}} \times 100$	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Penyelenggaraan lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan	1 ANDREAS RIKARDUS NUARIA, ST 2 AMBROSIA SRI REDJEKI, S.Kom 3 YOHANIS TAPING, SE	APBD
	Sasaran : Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas	Cakupan layanan Transportasi	$\frac{\text{Jumlah Jaringan Jalan Kabupaten Terlayani Angkutan Umum}}{\text{Jumlah Total Jaringan Jalan Kabupaten yang belum Terlayani Angkutan Umum}} \times 100$	%	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	YOHANIS TAPING, SE	APBD
		Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan Umum yang di Uji}}{\text{Jumlah Kendaraan Umum yang wajib uji}} \times 100$	%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	GABRIEL JEDHO, A.md	APBD
		Cakupan fasilitas perlengkapan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas LLAJ Terpasang}}{\text{-----}} \times 100$	%	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk	GABRIEL JEDHO, A.md	APBD

		jalan (rambu, marka, dan guardril dan peneraangan jalan umum)	Jumlah Fasilitas LLAJ yang wajib Terpasang		Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
		Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum (perkotaan/pedesaan) Memenuhi Standar Keselamatan}}{\text{Jumlah Total Angkutan Umum pada Kabupaten}} \times 100$	%	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	GABRIEL JEDHO, A.Md	APBD
		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	$\frac{\text{Jumlah penurunan pelanggaran lalu lintas Tahun berjalan}}{\text{Jumlah penurunan pelanggaran lalu lintas Tahun sebelumnya}} \times 100$		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang disediakan	AMBROSIA SRI REDJEKI, S.Kom	APBD
					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana jalan yang di bangun	YOHANES BERCHMANS GAMELIEL,A.Md	APBD
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	YOHANES BERCHMANS GAMELIEL,A.Md	APBD
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	YONORIUS PAGA SETI, ST	APBD
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	AMBROSIA SRI REDJEKI, S.Kom	APBD

						Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		YOHANES BERCHMANS GAMELIEL, A.Md	APBD
						Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		YOHANES BERCHMANS GAMELIEL, A.Md	APBD
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		YOHANES BERCHMANS GAMELIEL, A.Md	APBD
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		YONORIUS PAGA SETI, ST	APBD
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		YOHANES BERCHMANS GAMELIEL, A.Md	APBD
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir		YOHANIS TAPING, SE	APBD
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		AGUSTINUS L. WATON, ST	APBD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan		AGUSTINUS L. WATON, ST	APBD

						Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah kendaraan yang di uji		ANDREAS RIKARDUS NUARIA, ST	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD

						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		ANDREAS RIKARDUS NUARIA, ST	APBD
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD
						Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD
						Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD

						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD
						Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		FABIAN RONALD EDWARD WOEN, SE	APBD
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Berkurangnya Pelanggaran lalulintas		AGUSTINUS L. WATON, ST	APBD
						Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya		AGUSTINUS L. WATON, ST	APBD

						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		AGUSTINUS L. WATON, ST dan AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		AGUSTINUS L. WATON, ST	APBD
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		AGUSTINUS L. WATON, ST dan AGUSTINUS DALO, S.Sos	APBD
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		AGUSTINUS L. WATON, ST	APBD
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran		AMBROSIA SRI REDJEKI, S.Kom	APBD
						Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		AMBROSIA SRI REDJEKI, S.Kom	APBD

						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	YONORIUS PAGA SETI, ST	APBD
						Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	AMBROSIA SRI REDJEKI, S.Kom	
						Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	YONORIUS PAGA SETI, ST	APBD

						Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan		YOHANES BERCHMANS GAMELIEL, A.Md	APBN
						Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara		YOHANES BERCHMANS GAMELIEL, A.Md	APBN
	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks profesionalisme ASN				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		MAURITIUS MINGGO, ST.MT	APBD
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pelayanan perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah		YULVENMIUS MARINDO, ST	APBD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		YULVENMIUS MARINDO, ST	APBD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		YULVENMIUS MARINDO, ST	APBD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		MUHAMMAD HAMKA	APBD

						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan		MUHAMMAD HAMKA	APBD

						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		MUHAMMAD HAMKA	APBD
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		MUHAMMAD HAMKA	APBD

						Air dan Listrik yang Disediakan			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		MUHAMMAD HAMKA	APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		MUHAMMAD HAMKA	APBD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		MUHAMMAD HAMKA	APBD
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin yang dipelihara		MUHAMMAD HAMKA	APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		MUHAMMAD HAMKA	APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		MUHAMMAD HAMKA	APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		MUHAMMAD HAMKA	APBD


Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sikka,

MAURITIUS MINGGO, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740128 20003 1 001